

## GLOBALISASI, MODERNISASI, DAN PAUGERAN DI KESULTANAN YOGYAKARTA

*Globalization, Modernization, and Paugeran in the Palace of Yogyakarta*

**Sigit Surahman**

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIPKUM, Universitas Serang Raya

Email: saleseven@gmail.com

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Globalization,  
Modernization,  
Paugeran, Yogyakarta  
Sultanate

**Kata Kunci:**

Globalisasi,  
Modernisasi,  
Paugeran, Kesultanan  
Yogyakarta

**How to cite:**

Surahman, S. (2020).  
Globalisasi,  
Modernisasi, dan  
Paugeran di  
Kesultanan  
Yogyakarta. Kareba:  
Jurnal Ilmu  
Komunikasi, 9(2),  
292-307

### ABSTRACT

*The awarding of the title "Mangkubumi" to Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, contextualises the successor to the throne. In the Islamic kingdom of Yogyakarta has never been led by a queen. This seems to be the step of the Sri Sultan HBX to change the position of the Yogyakarta Sultanate. The demands of globalization, especially the emancipation of equal rights of men and women, are the reason. The openness of the leader's mind determines the progress of the Yogyakarta Sultanate. Three information on globalization: 1) slowly leaving modernity. 2) moving towards new conditions. 3) Demonstrate the dynamics of development (Steger, 2008: 8). Cultural globalization refers to intensification and expansion. Associated with culture, globalization is a symbolic construction, and articulation, some opinions suggest that cultural practice lies in contemporary globalization (Steger, 2008: 69). Paugeran did not become a reason for rejecting the appearance of the Queen in the height of modern power. Development dynamics and the creative economy make life balance in the welfare of society. The social and cultural environment in Yogyakarta changes with the needs and realization of life. Like the spatial layout of the city, the tourism sector and culture in Yogyakarta. In this era of globalization it provides a space for gender equality and male domination is a past for women in the Yogyakarta Sultanate.*

### Abstrak

Pemberian gelar "Mangkubumi" pada Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, mengkontekstasikan penerus takhta. Dalam kerajaan Islam Yogyakarta belum pernah dipimpin seorang ratu. Nampaknya ini jadi langkah Sri Sultan HBX untuk mengubah *paugeran* Kesultanan Yogyakarta. Tuntutan globalisasi, terutama emansipasi persamaan hak laki-laki dan perempuan menjadi alasannya. Keterbukaan pemikiran pemimpin menentukan kemajuan Kesultanan Yogyakarta. Tiga informasi globalisasi: 1) perlahan meninggalkan modernitas. 2) bergerak menuju kondisi baru. 3) Menunjukkan dinamisasi pembangunan (Steger, 2008:8). Globalisasi budaya mengacu pada intensifikasi dan ekspansi. Dikaitkan budaya maka globalisasi merupakan konstruksi simbolis, dan artikulasi, beberapa pendapat menunjukkan praktik budaya terletak pada globalisasi kontemporer (Steger, 2008:69). *Paugeran* tidak jadi alasan penolakan munculnya Ratu dalam puncak kekuasaan modern. Dinamisasi pembangunan dan ekonomi kreatif menjadikan keseimbangan kehidupan pada kesejahteraan masyarakat. Sosial dan kultural lingkungan di Yogyakarta berubah seiring kebutuhan serta realisasi hidup. Seperti tata ruang wilayah kota, sektor pariwisata, dan kebudayaan di Yogyakarta. Di era globalisasi ini

---

memberikan ruang kesetaraan gender dan dominasi lelaki merupakan masa lalu bagi perempuan di lingkungan Kesultanan Yogyakarta.

---

## PENDAHULUAN

Kesultanan Yogyakarta tidaklah asing terdengar di telinga. Kota yang identik dengan masyarakat multikultural. Kota yang didiami oleh berbagai macam suku, adat, dan budaya membawa konsekuensi potensi konflik besar. Hal itu berpotensi menghancurkan hasil peradaban yang ada. Tetapi juga mampu memadamkan daya perekat bisa mempertahankan adat, norma, dan tatanan yang ada.

Sri Sultan HBX sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta memberikan keuntungan dari sisi material dan politik. Keuntungan sisi material, letak geografis tanah yang ada di sejumlah wilayah Kota Yogyakarta adalah milik Kesultanan. Keuntungan dari sisi politik, pemimpin Kesultanan Yogyakarta sekaligus sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengimplikasikan bahwa raja di Kesultanan Yogyakarta memiliki kekuasaan penuh secara politik terhadap seluruh wilayah dan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (Choiriyati, 2017:82).

Sistem monarki di Yogyakarta diakui keberadaannya yang menjadikannya sebagai “daerah istimewa”. UU No. 13 tahun 2012 mengharuskan Gubernur Yogyakarta adalah Raja Keraton Yogyakarta. Undang-undang ini terlihat sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengatur sistem pemerintahan di Yogyakarta, namun di sisi lain juga menjadi alat yang membelenggu bagi Kesultanan Yogyakarta. Di mana posisi kesultanan yang memiliki otoritasnya sendiri sesuai yang sudah diatur dalam undang-undang. Hal ini yang kemudian modernisasi kepemimpinan di Kesultanan Yogyakarta yang lekat dengan tradisi dan pakem-pakem *paugeran* Keraton. Dari sejarah dinamika kehidupan keraton di Nusantara, Keraton Yogyakarta memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebesaran kerajaan ini tak lekang seiring perjalanan waktu. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sebuah wilayah sarat histori, kekuasaan kerajaan Mataram sebagai cikal bakal Keraton Yogyakarta menyisakan jejak kekuasaan bagi masyarakat dengan raja bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Keraton Yogyakarta memiliki perbedaan dengan keraton keraton lainnya di nusantara, mengingat raja (sultan) Keraton Yogyakarta selain sebagai raja di keraton yogyakarta, juga memiliki kedudukan dalam pemerintahan sebagai wujud keistimewaan DIY (Abidin, 2017:12).

Otoritas yang dimiliki Kesultanan Yogyakarta ini memunculkan wacana bagi Sri Sultan HBX dalam konsep kepemimpinan. Terlebih dengan dikeluarkannya Sabdatama Sri Sultan HBX yang sifatnya harus ditaati. Pemberian gelar “Mangkubumi” pada Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pambayun, mengkontekstasikan penerus takhta. Belum pernah ada raja Mataram Islam memberi gelar mangkubumi kepada seorang putri. Dalam kerajaan Islam Yogyakarta belum pernah dipimpin seorang ratu. Berbagai tuduhan dilontarkan oleh adik-adik Sri Sultan HB X, bahwa Sri Sultan HB X telah mempersiapkan putrinya sebagai penerus takhta Kesultanan Yogyakarta agar tidak terlepas dari garis keturunannya langsung. (Triyono dkk, 2017:190).

Selama ini posisi perempuan di Kesultanan Yogyakarta sering ditenggelamkan dalam narasi sejarah karena dominannya sistem patriarki. Akan tetapi hal tersebut seharusnya cukup menjadi cerita masa lalu. Tidak lantas dijadikan sebagai alasan untuk menolak kemunculan Sultan perempuan di Kesultanan Yogyakarta yang lebih modern di era milenial. Hal ini dilakukan Sultan HBX untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Sri Sultan HBX mulai menerapkan pola modernitas yang memajukan bangsa Barat. Dengan memberikan gelar Mangkubumi kepada GKR Pambayun ini dijadikan langkah awal bagi Sri Sultan HBX menerapkan modernitas di tengah-tengah tradisi dan

**paugeran** yang sudah ada dan berlaku di Kesultanan Yogyakarta (Triyono dkk, 2017:189)

Keberadaan kaum modernis yang ditanggapi oleh kaum tradisionalis mulai memunculkan wacana baru. Sesungguhnya keberadaan dari kedua kalangan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara kontekstual keduanya sama-sama benar. Masing-masing saling mengisi saling mengoreksi, akan saling menguatkan (Bakti, 2009: 40-41).

Perubahan masyarakat Yogyakarta telah menggeser nilai-nilai lokal. Falsafah budaya kini menjadi sesuatu yang usang di masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh pada peran dan posisi Kesultanan Yogyakarta di masyarakat. Pandangan masyarakat bergeser dari yang dahulu melihat Kesultanan Yogyakarta sebagai otoritas tunggal, Saat ini pandangan masyarakat terhadap Kesultanan Yogyakarta lebih sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan di era modern. Globalisasi dan modernisasi menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan lagi di lingkungan Kesultanan Yogyakarta (Triyono dkk, 2017: 193).

Pada konteks modernisasi, cara otoriter tidak lagi dapat dihindarkan. Pendekatan yang ditawarkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi bersifat *top-down*. Model modernisasi yang demikian ini berasumsi negara yang maju dan berkembang karena bertransformasi pemikiran. Pembaruan pemikiran tradisional, lokal, dan ketinggalan zaman bergerak pada pemikiran maju (*the idea of progres*) (Bakti, 2013:36).

Pengangkatan GKR Mangkubumi menjadi babak baru di Kesultanan Yogyakarta. Melihat rekam jejak GKR Pambayun yang tumbuh sebagai perempuan dengan keterbukaan wawasan pendidikan modern dan global. Tentunya menjadi pembeda dibandingkan leluhurnya. GKR Pambayun menempuh studi tingkat tingginya di luar negeri seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Australia selain pendidikan tradisional di keraton yang begitu kental. Pemikiran-pemikiran modern yang didapat selama menempuh pendidikan dinilai mampu memberikan perubahan pandangan demokrasi di tengah-tengah pandangan tradisional dari Kesultanan Yogyakarta (Triyono dkk, 2017:189).

Pemahaman demokrasi secara umum adalah kepemimpinan dan kedaulatan politik ditangan rakyat. Intinya adalah kemampuan rakyat dalam melakukan negosiasi sejajar dengan pemimpin. Idealnya konstituen mengenal calon pemimpin yang akan dipilih. Hal yang krusial dimiliki oleh seorang calon pemimpin adalah bagaimana rekam jejak yang dilakukan dan familiar di masyarakat (Bakti, 2012:4-5).

Nampaknya pemberian gelar Mangkubumi jadi langkah Sri Sultan HBX untuk mengubah *paugeran* di Kesultanan Yogyakarta. Sultan HB X mengubah tradisi karena tuntutan globalisasi, terutama emansipasi persamaan hak laki-laki dan perempuan. GKR Mangkubumi dipersiapkan menuju singgasana takhta Raja Kesultanan Yogyakarta. Keterbukaan pemikiran pemimpin menentukan kemajuan Kesultanan Yogyakarta. Banyak harapan bahwa GKR Mangkubumi akan memberikan pembaharuan dan menjadi inspirasi perubahan Yogyakarta sebagai institusi monarki yang modern dengan kekuatan politik sesungguhnya. Dari pandangan politik, langkah Sri Sultan HB X ini sebagai suksesi penerus takhta. Dari pandangan tradisi, langkah ini menjadi awal bagi Kesultanan Yogyakarta untuk menjawab tantangan perkembangan zaman seperti halnya kota-kota besar lainnya (Triyono dkk, 2017:199).

Dari latar belakang ini, maka muncul pertanyaan. Bagaimana takhta raja, kekuasaan perempuan, paugeran keraton dan globalisasi di Kesultanan Yogyakarta? Apa aspek modernitas yang perlahan ditinggalkan oleh Kesultanan Yogyakarta? Apa saja yang mulai mengalami pergeseran menuju kondisi

global? Apa dinamisasi gagasan pembangunan di Kesultanan Yogyakarta?

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Definisi Globalisasi**

Berkenaan dengan definisi yang tepat dari globalisasi, mereka juga tidak setuju skala, penyebab, kronologi, dampak, lintasan, dan kebijakan hasil. Gagasan 'multidimensionalitas' muncul sebagai atribut penting globalisasi dalam definisi tersendiri. Perdebatan akademis yang berlangsung tentang dimensi mana yang mengandung esensi globalisasi merupakan versi postmodern. Bahkan para ulama yang setuju bahwa globalisasi paling baik dianggap sebagai benturan proses tunggal dengan satu sama lain di mana aspek kehidupan sosial merupakan domain utama dari fenomena tersebut. Beberapa ahli berpendapat demikian proses ekonomi terletak pada inti dari globalisasi. Hak istimewa lainnya aspek politik, budaya, atau ideologis. Karena globalisasi mengandung banyak segi dan proses dibedakan, aman untuk mengatakan bahwa hampir tidak ada daerah kehidupan sosial melarikan diri dari jangkauannya (Steger, 2008: 15-16).

Sejak 1960-an, istilah 'globalisasi' digunakan dalam literatur populer maupun akademis untuk mendeskripsikan proses, kondisi, sistem, kekuatan, dan usia. Istilah globalitas menandakan suatu kondisi sosial dicirikan oleh adanya ekonomi global, politik, interkoneksi budaya, lingkungan dan arus yang membuat banyak batas dan batas yang ada saat ini tidak relevan. Istilah globalisasi digunakan untuk merujuk pada satu proses sosial yang dianggap mengubah kondisi sosial menjadi salah satu globalitas. Frasa populer 'globalisasi sedang terjadi' mengandung tiga bagian penting informasi: pertama, perlahan-lahan meninggalkan kondisi modernitas yang berangsur-angsur mulai dari abad ke-16 dan seterusnya. Kedua, bergerak menuju kondisi baru (postmodern) globalisasi. Ketiga, kami belum mencapainya. Modernisasi dan kata benda verbal lainnya yang berakhiran akhiran istilah 'globalisasi' menunjukkan semacam dinamisme terbaik ditangkap oleh gagasan pembangunan atau berlangsung bersama pola yang dapat dilihat (Steger, 2008: 7-8).

Pembukaan semacam itu dapat terjadi dengan cepat atau lambat sesuai dengan gagasan perubahan. Hal ini menunjukkan transformasi kondisi sekarang. Melihat konsep globalisasi sebagai proses yang berkelanjutan bukan sebagai kondisi statis. Maka dalam pengamatan harus memperhatikan perubahan persepsi ruang dan waktu. Inilah yang menjelaskan mengapa para pakar globalisasi memberikan arti tertentu untuk analisis historis dan rekonfigurasi ruang sosial. Salah satu alasannya mengapa globalisasi tetap merupakan konsep yang diperebutkan karena tidak ada konsensus ilmiah tentang jenis proses sosial apa yang membentuknya esensi. Meskipun ada perbedaan pendapat yang kuat, bagaimanapun, adalah mungkin untuk mendeteksi beberapa tumpang tindih tematik dalam berbagai upaya ilmiah mengidentifikasi kualitas penting dari proses globalisasi. Proses yang serba luas, tidak terbatas, dan merangkul semua aspek kehidupan (Surahman, 2013:30).

Steger, (2008: 11-13) mengemukakan, ada beberapa tokoh menyarankan bahwa empat kualitas yang berbeda atau karakteristik terletak pada inti fenomena tersebut antara lain: Anthony Giddens, mengatakan konsep globalisasi mencerminkan rasa yang sangat besar, membesarnya komunikasi dunia, serta cakrawala dari pasar dunia, keduanya tampak jauh lebih nyata dan langsung dari pada tahap awal modernitas. Fredric Jameson, mengemukakan globalisasi dianggap sebagai serangkaian proses yang mewujudkan transformasi dalam ruang organisasi hubungan sosial dan transaksi – dinilai dalam hal ekstensitas, intensitas, kecepatan, dan dampaknya menghasilkan aliran lintas benua dan antar jaringan aktivitas, interaksi, dan latihan kekuasaan. David Held, menyatakan globalisasi sebagai konsep

merujuk pada kompresi dunia dan intensifikasi kesadaran dunia secara keseluruhan. Roland Robertson, berpendapat globalisasi memampatkan aspek waktu dan ruang hubungan sosial. James Mittelman, menyatakan kualitas globalisasi tercermin dalam ekspansi dan peregangan hubungan sosial, aktivitas, dan interdependensi. Pasar keuangan saat ini tersebar di seluruh dunia.

Proses globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia berarti kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi jauh, dan sebaliknya. Proses yang tampaknya bertentangan dan lokalisasi sebenarnya menyiratkan satu sama lain. 'Lokal' dan 'global' membentuk titik akhir dari kontinum spasial yang bagian pusatnya ditandai oleh 'nasional' dan 'regional'. Globalisasi juga merujuk pada orang yang semakin sadar manifestasi pertumbuhan interdependensi sosial dan akselerasi interaksi sosial yang besar. Kesadaran mereka tentang pentingnya batas geografis dan jarak menumbuhkan rasa yang kuat untuk menjadi bagian dari keseluruhan global.

Globalisasi mengacu pada serangkaian proses sosial multidimensional yang menciptakan, menggandakan, meregangkan, dan mengintensifkan di seluruh dunia saling ketergantungan sosial dan pertukaran sementara pada saat yang sama waktu membina pada orang-orang kesadaran yang semakin meningkat akan pendalaman koneksi antara lokal dan jarak jauh. Lebih banyak area kontestasi, meskipun kami sampai pada definisi kerja yang memadai globalisasi dengan menarik beberapa wawasan umum yang muncul definisi yang berpengaruh lainnya, kita tidak boleh melupakan fakta itu masih ada beberapa bidang kontestasi. Lagi pula, globalisasi adalah proses yang tidak merata, artinya orang yang tinggal di dalamnya berbagai belahan dunia dipengaruhi sangat berbeda oleh transformasi raksasa struktur sosial dan zona budaya. Oleh karena itu, proses sosial yang membentuk globalisasi telah terjadi dianalisis dan dijelaskan oleh berbagai komentator dan sering kontradiktif (Surahman, 2013:32).

Globalisasi telah dikatakan terjadi ketika kegiatan sedang berlangsung dalam kondisi berikut. Pertama, mereka berlangsung bukan di arena nasional dan regional tetapi di luar. Kedua, mereka sengaja terorganisir dalam skala global. Ketiga, mereka melibatkan beberapa interdependensi, sehingga aktivitas lokal di berbagai belahan dunia dibentuk oleh satu sama lain. Keempat, mereka sering melibatkan teknologi yang memungkinkan seketika sebagai lawan dari komunikasi yang cepat (Bakti, 2011:2-3).

### **Globalisasi Budaya**

Globalisasi budaya mengacu pada intensifikasi dan ekspansi arus budaya di dunia. Konsep budaya sangat luas; sering digunakan untuk menggambarkan seluruh pengalaman manusia. Untuk menghindari generalisasi, penting membuat perbedaan analitis, sebagai contoh, kami mengaitkan kata sifat 'ekonomi' dengan produksi, pertukaran, dan konsumsi komoditas. Jika kita membahas 'politik', praktiknya berkaitan dengan pembangkitan dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Berbicara tentang 'budaya', kami prihatin dengan konstruksi simbolis, dan artikulasi. Meluasnya jaringan interkoneksi budaya dan interdependensi pada dekade terakhir menyebabkan beberapa pendapat menunjukkan bahwa praktik budaya terletak di jantung globalisasi kontemporer. Difasilitasi oleh internet dan teknologi baru, sistem simbolik makna yang dominan; seperti individualisme, konsumerisme, dan beragam wacana religius beredar lebih bebas daripada sebelumnya (Steger, 2008:69).

Surahman,(2013:33) menuliskan praktik budaya sering bergeser dari tempat-tempat tertentu seperti kota dan negara, akhirnya memperoleh makna baru dalam interaksi tema global. Ketegangan antara kesamaan dan perbedaan budaya global yang muncul; peran perusahaan media transnasional

dalam menyebarkan budaya populer; globalisasi bahasa; dan dampak nilai materialis dan konsumerisme. Pasar bebas menganut nilai-nilai global kapitalisme konsumen. Adalah satu hal untuk mengakui keberadaan homogenisasi di dunia, tetapi sangat berbeda bahwa keragaman budaya yang ada di dunia ditakdirkan untuk menghilang.

Sosiolog Roland Robertson, berpendapat; arus budaya global sering menghidupkan kembali budaya lokal, dengan demikian tidak sepenuhnya dilenyapkan oleh kekuatan konsumerisme Barat. Perbedaan lokal dan partikularitas masih memainkan peran penting dalam menciptakan budaya konstelasi. Debat bahwa globalisasi budaya selalu terjadi dalam konteks lokal, Robertson menolak tesis budaya homogenisasi dan berbicara sebagai ganti 'globalisasi', interaksi kompleks global dan lokal yang ditandai oleh pinjaman budaya. Ekspresi budaya yang dihasilkan 'hibriditas' tidak dapat direduksi jadi manifestasi yang jelas 'kesamaan' atau 'perbedaan'. Yang kontemporer pengalaman hidup dan bertindak lintas batas budaya berarti keduanya kehilangan makna tradisional dan penciptaan ekspresi simbolik baru (Steger, 2008:75).

Globalisasi budaya berkontribusi pada perubahan yang luar biasa dalam kesadaran manusia. Faktanya, struktur modernitas lama perlahan memberi jalan ke kerangka 'postmodern' yang ditandai dengan kurang stabilnya rasa identitas dan pengetahuan. Mengingat kerumitan arus budaya global, seseorang akan benar-benar berharap untuk melihat efek yang tidak seimbang dan kontradiktif. Konteks tertentu, arus ini mungkin mengubah manifestasi identitas nasional tradisional ke arah karakteristik budaya populer dengan kesamaan; di tempat lain mereka mungkin menumbuhkan ekspresi budaya partikularisme; di lain pihak mereka mungkin mendorong bentuk-bentuk hibriditas budaya (Paul, 2000: XV).

*Intensifying globalization thus reconstitutes rather than simply supplants longestablished patterns by which subjects and citizens are fashioned, including place, locality, and tribal and national identity. Processes as varied as mass migration, the establishment of diasporic communities and increased access to images and ideas originating in geographically distant and culturally-unrelated spaces Ade changed through processes of globalization. The global world is one in which 'both points of departure and points of arrival are in cultural flux, and thus the search for steady points of reference, as critical life choices are made, can be difficult' (Paul, 2000: XV).*

Demografis masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dalam berbagai hal, diantaranya, wilayah geografis, keberagaman budaya, dan lingkungan alam. Keberagaman masyarakat ini dapat dicerminkan juga dalam berbagai ekspresi budaya dan kesenian. Kesenian yang dikembangkannya itu menjadi model-model pengetahuan dalam masyarakat. Dapat pula dikatakan bahwa berbagai kelompok masyarakat di Indonesia bisa dan mampu mengembangkan keseniannya yang sangat khas (Surahman, 2016:34).

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel hasil penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap, dan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat Yogyakarta atau di sekitar lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pertentangan modernisasi, globalisasi, dan juga keberadaan *paugeran* di Kesultanan Yogyakarta. Perbedaan antarfakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, melalui studi kepustakaan baik dari buku, jurnal, ataupun referensi lain yang

mendukung penelitian.

## **HASIL PENELITIAN**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara Kabupaten Sleman, sebelah timur Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan Kabupaten Bantul, sebelah barat Kabupaten Bantul dan Sleman.

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km<sup>2</sup> yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 489.000 jiwa dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/Km<sup>2</sup>

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km<sup>2</sup>. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

Kota Yogyakarta pada tahun 2000-an ini tidak lagi terlihat seperti era tahun 90-an. Kota Yogyakarta tumbuh berkembang seperti layaknya peradaban dunia yang bertransformasi menyesuaikan tuntutan zaman. Ikon kota Yogyakarta yakni “Tugu Yogya dan Malioboro” sekarang nyaris tertutupi oleh kehadiran bangunan hotel dan apartemen menjulang tinggi disekelilingnya. Banyak bermunculannya pusat perbelanjaan, cafe, dan tempat-tempat nongkrong menjadi simpul-simpul komersial baru di seluruh penjuru Kota Yogyakarta.

Laju pertumbuhan ekonomi dan bisnis tidak dapat dihindarkan begitupula dengan dampaknya. Terutama pada sektor pariwisata yang menjadi target para investor untuk memasukkan modal mereka. Namun hal tersebut tidak serta merta memberikan dampak positif kepada masyarakat kecil secara langsung. Semestinya, kehadiran pembangunan itu bisa menjawab tantangan zaman, bukan untuk mencabut akar tradisi yang sudah ada. Modernitas di Kota Yogyakarta akan terus diuji dengan berbagai permasalahan.

Yogyakarta merupakan “daerah istimewa”, sistem monarki di Yogyakarta diakui keberadaannya. Hal ini telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2012 mengharuskan Gubernur Yogyakarta adalah orang yang memegang jabatan Raja Keraton Yogyakarta. Keberadaan UU tersebut pada satu sisi terlihat sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengatur sistem pemerintahan di Yogyakarta. Penetapan gubernur dan wakil gubernur tanpa pemilu di Yogyakarta telah memunculkan permasalahan kultural di dalam internal keluarga Keraton Yogyakarta. Hal itu menjadi modal untuk mengamankan takhta Kesultanan Yogyakarta dan tampuk kepemimpinan daerah (Gubernur). Terlebih sangat jelas tindakan tersebut dijamin oleh hak tradisional yang dimiliki Kesultanan Yogyakarta secara legal formal diakui dalam Undang-Undang Negara. (Surahman, 2017:178).

Konflik mulai muncul ketika Sri Sultan HBX mengeluarkan Sabdatama pengangkatan Putri Mahkota. Sabdatama adalah perintah raja yang sifatnya harus ditaati. Pemberian gelar “Mangkubumi” pada Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pambayun, mengkontekstasikan penerus takhta. Sabdatama memicu

pro-kontra di keluarga Kesultanan. Belum pernah ada raja keturunan Mataram Islam memberi gelar mangkubumi kepada seorang putri. Dalam kerajaan Islam Yogyakarta belum pernah dipimpin seorang ratu. Namun hal itu tentu bersifat subjektif, jika dihadapkan pada tuntutan zaman modern emansipatif persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Isu suksesi kepemimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi persoalan politik, ditengarai oleh munculnya dua persepsi yang berbeda dalam penentuan mekanisme kepemimpinan di DIY. Di satu sisi Gubernur DIY menghendaki tetap mempertahankan mekanisme “penetapan” Dwi Tunggal Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sementara di sisi yang lain berusaha mengembangkan aspek demokrasi dalam penentuan mekanisme kepemimpinan DIY melalui proses “pemilihan langsung”.

Perkembangan Kesultanan Yogyakarta yang sangat pesat dibutuhkan pula seorang pemimpin muda yang gesit (*cekatan*) dan agresif dalam bertindak. Cepatnya pertumbuhan inovasi baik infrastruktur maupun non-infrastruktur di lingkungan Kesultanan Yogyakarta banyak dilirik oleh investor. Misalnya revitalisasi cagar budaya di lingkungan Keraton seperti, Taman Sari, Sumur Gemuling, Alun-alun idul, Kantor Pos Yogyakarta, Museum Kereta, dan beberapa lainnya mengindikasikan geliat investor masuk ke Yogyakarta. Belum lagi pertumbuhan hotel, *home stay*, dan juga apartemen yang juga semakin banyak.

Selain inovasi infrastruktur, di sektor kebudayaan Yogyakarta juga mengalami banyak perkembangan dan inovasi pula. Keistimewaan budaya Yogyakarta tetap eksisi karena kekuatan pada nilai-nilai tradisi yang berbasis budaya lokal Jawa Mataram. Akan tetapi terbuka dan tetap selektif terhadap kehadiran kultur budaya modern yang sifatnya mengglobal. Gerakan kebudayaan yang masif pada era negara modern dilakukan berbagai lembaga dan sanggar kesenian, budayawan, cendekiawan, seniman, bahkan agamawan. Para pengusaha ekonomi lokal dan tokoh-tokoh adat juga turut membangun dan menjaga peradaban di Yogyakarta.

Globalisasi dan modernisasi menjadi ancaman tergerusnya tradisi di Yogyakarta. Di Yogyakarta, terdapat lebih dari 40 lembaga pendidikan tinggi yang terdiri dari kampus negeri dan kampus swasta. Setiap tahun bisa menampung lebih dari 60 ribu mahasiswa baru dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri. Hotel dan pusat perbelanjaan modern banyak bermunculan enam tahun terakhir sejak tahun 2012. Modernisasi tersebut menciptakan kebaruan dan perubahan masyarakat. Masyarakat Yogyakarta tidak lagi sekedar pasif menerima kondisi itu. Sebaliknya masyarakat Yogyakarta aktif berinteraksi dengan dunia dan era baru ini. Bahkan tidak sedikit yang menjadi bagian dari pusaran persaingan industri, ekonomi, pembangunan, dan globalisasi yang terjadi.

Proses percepatan pembangunan di Yogyakarta terpampang nyata bagaimana indah dan piawainya menciptakan magnet untuk menarik wisatawan. Pertumbuhan dan akulturasi budaya serta arsitektur menambah daya tarik tersendiri. Tempat-tempat wisata, cafe, pusat kesenian, pusat belanja, memberikan dinamisasi bagi masyarakat Yogyakarta. Ekonomi kecil kini tumbuh dan meningkatkan taraf hidup warga Yogyakarta. Pertumbuhan itu terjadi bukan sekedar di pusat Kota Yogyakarta saja. Akan tetapi hampir di seluruh wilayah Kesultanan Yogyakarta.

Misalnya Kota Yogyakarta dengan pesona Malioboro dan sekitarnya. Kota Gede dengan peranakan perak dan wisata religinya. Kabupaten Sleman dengan agro wisatanya. Kabupaten Kulon Progo dengan wisata goa dan air terjun. Kabupaten Bantul dengan Parangtritis dan Gumuk Pasir Parang Kusumo, Gunung Kidul dengan wisata garis pantainya. Perekonomian tumbuh merata di seluruh

wilayah Kesultanan Yogyakarta.

Perubahan budaya di wilayah Kesultanan Yogyakarta merupakan bentuk dinamisasi yang terjadi. Pola berfikir, cara dan gaya hidup dari masyarakat itulah perubahan. Pemahaman tradisi, pengertian harmoni, dinamisasi itu yang menjadikan Kota Yogyakarta selalu istimewa. Keistimewaan Yogyakarta dicirikan dari nilai kultural, etika, kreatif, menghargai pluralisme, mengutamakan budaya komunal, dan produktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Budaya dan Tradisi Leluhur**

Budaya sama halnya dengan kultur yang lekat dengan tradisi. Pada praktik kehidupan sehari-hari dalam menjalankan kebudayaan berkaitan dengan budi pekerti. Kebudayaan di Kesultanan Yogyakarta memiliki kaitan antara budaya manusia dan lingkungan yang terus berkembang. Sehingga bagaimana menghormati tradisi leluhur, dikaitkan dengan kesediaan penerusnya menempatkan pada posisi yang proporsional. Kehidupan di zaman postmodern harus tetap terikat dengan keluhuran kebudayaan untuk tetap menjadi pribadi yang berbudaya.

Untuk melihat modernisasi yang perlahan ditinggalkan oleh Sri Sultan HBX dan Kesultanan Yogyakarta. Antara lain mulai ditinggalkannya beberapa paugeran di Kesultanan Yogyakarta, warisan tradisi leluhur. Maka perlu melihat langkah-langkah yang selaras dengan nilai-nilai kekinian dilakukan oleh Sri Sultan HBX. Hal ini dilakukan untuk meraih kepercayaan dan simpati dari istri anggota keluarga serta rakyat Yogyakarta.

Mendefinisikan kembali Raja yang adil sebagai keadilan sosial, perdamaian, dan demokrasi. Kepercayaan dalam predeterminisme dan takhayul melemahkan pembangunan. Lantas bagaimana meninggalkan dukungan ini yang menjanjikan keamanan dan kebahagiaan melalui mukjizat, imajinasi, meditasi, do'a, puasa untuk jangka waktu yang lama. Meminta bantuan seorang pemimpin spiritual hanya bisa menjadi proses bertahap dan konteks Indonesia (Bakti, 2000:213).

Modernisasi dan globalisasi di Kesultanan Yogyakarta memang terus diikuti oleh pemerintahan dan masyarakatnya. Modernisasi dan globalisasi yang berlebihan bisa menjerumuskan pada ketidakberdayaan masyarakat. Misalnya budaya tradisi leluhur, prinsip utama orang Jawa harus mandiri dan mampu mengatasi hidupnya. Budaya selalu bersifat dinamis, atrinya selalu berkembang. Sehingga dapat dikatakan nyaris tidak ada budaya asli, yang ada adalah budaya yang terus mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman.

Masyarakat Yogyakarta yang identik dengan hal-hal mistik, irasional, dan klenik. Kini dalam kondisi yang telah berubah dari arus modernisasi menjadi rasionalitas instrumental. Hal ini berakibat pada narasi yang dibangun atas pola pikir mistikisme khas Jawa mendapat gangguan pola pikir rasional instrumental (Jaya, 2012:134).

Laju perkembangan di Kesultanan Yogyakarta tidak mungkin bisa dibendung lagi. Artinya hal tersebut akan berpengaruh pada budaya dan tradisi yang ada di Yogyakarta. Pergeseran dari modernisasi menuju globalisasi tersebut juga meliputi keberlangsungan kepemimpinan di Kesultanan Yogyakarta. Arus globalisasi seolah menjadi solusi atas diskriminasi yang selama ini diterima oleh kaum perempuan. Diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan mendapat angin segar dengan

hadirnya globalisasi. Globalisasi menyebarkan ideologi yang bersifat global terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Perempuan di Kesultanan Yogyakarta selama ini ditenggelamkan dalam narasi budaya, tradisi, dan aturan adat yang begitu dominannya sistem patriarki dalam feodalisme keraton. Hal tersebut tidak lantas menjadi alasan untuk penolakan kemungkinan munculnya sultan perempuan pada tampuk takhta Kesultanan Yogyakarta yang modern. Langkah Sri Sultan HBX mengangkat Gusti Kanjeng Ratu Pambayun (GKR) menjadi Putri Mahkota adalah sebuah keputusan menyikapi perkembangan di Kesultanan Yogyakarta. Langkah itu dikatakan sebagai suksesi kepemimpinan perempuan. Suatu bentuk langkah modernisasi yang brilian. Keputusan dan tindakannya selaras dengan nilai-nilai kekinian, di mana Sri Sultan HBX memutuskan untuk menghentikan tradisi poligami dengan mengambil selir untuk mendapatkan keturunan laki-laki.

Pengangkatan GKR Pambayun menjadi Putri Mahkota menjadi babak baru dalam hal penerus takhta di Kesultanan Yogyakarta. Harapan baru muncul untuk Kesultanan Yogyakarta sebagai kekuatan dan inspirasi institusi monarki era modern. Melihat latar belakang pendidikan dari GKR Pambayun yang tidak hanya mengenyam pendidikan tradisional di keraton saja, akan tetapi juga pendidikan di luar Negeri seperti Australia, Singapura, dan Amerika.

Ketidaksetujuan terhadap keputusan Sri Sultan HBX muncul dari adik-adiknya yang menganggap hal itu melanggar *paugeran* keraton. Tampuk kepemimpinan Yogyakarta dan takhta Keraton telah merenggangkan hubungan kekeluargaan di internal Kesultanan Yogyakarta. Budaya dan tradisi leluhur merupakan prinsip yang utama akan tetapi manusia harus mandiri dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masyarakat memiliki harga diri yang tinggi sebagai penduduk yang secara sosial-kultural sangat kental dengan budaya Jawa (Keraton Yogyakarta). Hal tersebut yang membuat kharisma Sri Sultan HBX sebagai raja sekaligus gubernur tidak dipertentangkan.

Globalisasi telah menimbulkan percepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses berkomunikasi dan mendapatkan informasi apa pun. Tidak dipungkiri semua justru menjadi suatu masalah yang paling krusial dalam globalisasi. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, di mana terdapat pengetahuan, kesenian, moral, kepercayaan, norma, hukum adat, dan tradisi leluhur yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat.

Seni budaya dan tradisi misalnya; taman hiburan rakyat Yogyakarta telah berganti peran. Tempat hiburan yang awalnya menyajikan pertunjukan seni budaya kini mengandalkan musik dangdut sebagai suguhan utama. Musik dangdut jelas bukan budaya asli Yogyakarta. Dengan keadaan tersebut, generasi muda Yogyakarta bisa buta dengan wayang kulit, wayang orang, dan ketoprak yang merupakan asli peninggalan kebudayaan Yogyakarta.

Kehadiran GKR Pambayun memberikan banyak harapan terhadap tantangan globalisasi. Latar belakang pendidikan dan pergaulannya, oleh Sri Sultan HBX dirasa mampu menjawab tantangan perkembangan zaman di Kesultanan Yogyakarta. Modernisasi dengan banyaknya pusat perbelanjaan dan hotel masih kental dan tidak meninggalkan tradisi. Hal ini juga memelihara atmosfer kreasi dalam mempertahankan seni tradisi dan memadukan seni tradisi dengan seni modern. Itulah salah satu jejak sejarah dan karakter Yogyakarta yang unik.

Untuk mencari tahu apa saja yang mulai mengalami pergeseran menuju kondisi global di Kesultanan Yogyakarta. Kondisi perkembangan teknologi, keterbukaan dengan adanya inovasi, baik

inovasi infrastruktur maupun budayanya. Paugeran Keraton tidak menjadi alasan penolakan terhadap munculnya Ratu dalam puncak kekuasaan Kesultanan modern. Sabdatama Sri Sultan HBX dikeluarkan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman.

Nilai-nilai yang disebarkan oleh media transnasional bukan hanya hegemoni budaya yang tak terbantahkan dari budaya populer, tapi juga mengarah pada depolitisasi realitas sosial. Salah satu perkembangan paling mencolok dari dua dekade terakhir adalah transformasi siaran berita dan program pendidikan. Sebuah ideologi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem ide yang dibagikan secara luas, keyakinan berpola, membimbing norma dan nilai, dan cita-cita diterima sebagai kebenaran oleh sekelompok orang tertentu. Ide-ide yang disederhanakan dan terdistorsi, sering dipekerjakan untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu atau struktur kekuasaan dominan.

Jadi, ideologi menghubungkan teori dan praktik dengan mengorientasikan dan mengatur tindakan manusia sesuai dengan norma dan kode etik. Seperti semua proses sosial, globalisasi mengandung ideologi dimensi isi dengan berbagai norma, klaim, keyakinan, dan narasi tentang fenomena itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum menjelajah dimensi ideologis globalisasi, kita harus membuat perbedaan analitik penting antara globalisasi – sosial proses mengintensifkan interdependensi global yang terjadi dijelaskan oleh berbagai pendapat sering bertentangan dan globalisme sebuah ideologi yang memberikan konsep globalisasi dengan nilai dan makna neoliberal.

Pergeseran zaman mengakibatkan kondisi masyarakat turut berubah. Banyaknya pendatang dan cepatnya arus informasi sedikit banyak mengubah wajah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan itu ditandai dengan peningkatan angka intoleransi antarumat beragama.

### **Inovasi Infrastruktur dan Non-Infrastruktur**

Yogyakarta sebagai daerah yang istimewa menjadi modal awal yang sangat potensial untuk menjawab tantangan globalisasi, terlebih pada industri kreatif. Tanpa meninggalkan substansinya, nilai keistimewaan itu dapat dieksplorasi dan dikapitalisasi jadi produk budaya yang memiliki nilai ekonomis. Produk industri kreatif tersebut antara lain: *fashion*, kerajinan, seni pertunjukan, kuliner, desain, arsitektur, musik, film, penerbitan dan pencetakan, riset dan pengembangan, televisi, permainan interaktif, fotografi, objek wisata, dan lainnya.

Pengembangan tata ruang memungkinkan tersedianya fasilitas publik. Seperti Taman Budaya, Tata kota sepanjang jalan Malioboro, Benteng Vnderberg, Kantor Pos Yogyakarta, Alun-alun Selatan, dan masih banyak lagi. Penyediaan ruang publik tersebut sebagai sarana interaksi sosial yang intensif bagi masyarakat maupun wisatawan. Yogyakarta semakin memiliki tata ruang yang baik, dan menjadikan kebudayaan semakin kuat.

Nilai warisan budaya fisik yang terkandung seperti tata ruang, bangunan-bangunan bersejarah: pemandian Putri Taman Sari, Sumur Gemuling, Keraton Yogyakarta, Kadipaten Puro Pakualaman semua dipoles dan direvitalisasi untuk kepentingan pariwisata. Belum lagi ruang-ruang publik lainnya, kampung Matraman tempat-tempat wisata, dan lainnya bisa dikenali melalui toponim. Produk-produk kebudayaan materi lainnya berupa benda-benda pusaka, kerajinan, kuliner, dan inovasi infrastruktur lainnya yang begitu mudah ditemukan di Yogyakarta.

Perkembangan bisnis perhotelan di Yogyakarta juga merupakan salah satu bentuk inovasi infrastruktur akibat modernisasi dan globalisasi yang terjadi. Pertumbuhan jumlah hotel di Yogyakarta

turut diimbangi dengan inovasi daya tarik wisatanya. Wisata di Yogyakarta meliputi MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata spiritual, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai fasilitas wisata lainnya. Hampir di setiap sudut kota Yogyakarta, pusat-pusat kuliner selalu ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Hal tersebut yang akhirnya diadopsi ke dalam hotel-hotel berbintang di Yogyakarta. Beragam kuliner khas Yogyakarta sangat menarik minat tamu baik wisatawan nusantara maupun manca negara untuk memutuskan hotel tempat mereka menginap.

Sementara itu dari segi non-infrastruktur/tidak tampak, aktualisasi nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta menjadi benteng pertahanan kebudayaan yang produktif terhadap arus budaya asing dalam negara yang cenderung ramah pada neo-liberalisme. Budaya tak tampak berupa sistem nilai, gagasan, perilaku dan nilai-nilai budaya lokal, kearifan lokal tercermin dalam wujud bahasa, ajaran moral, kesenian, karya sastra, perkembangan teknologi dan lainnya.

Gerakan kebudayaan era modern di Yogyakarta dilakukan berbagai lembaga pendidikan, budayawan, cendekiawan, dan seniman. Keberadaan tokoh adat, pengusaha lokal, bahkan investor turut membangun peradaban modern di Yogyakarta. Berjalannya nilai keistimewaan Yogyakarta mampu menjawab tantangan zaman yang berbasis budaya saing dan budaya tanding. Terlihat pada menguatnya percampuran nilai-nilai asing yang dibawa oleh globalisasi. Tampak jelas mewujudkan dalam industrialisasi berkembang karena kekuatan kapital.

Masyarakat Yogyakarta sebagai produsen dari kebudayaan menemukan ruang aktualisasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan pasar berbasis budaya sebagai pusat dinamika industri kreatif. Di mana produk-produk budaya ditawarkan kepada konsumen. Sesuai dengan semangat keistimewaan Yogyakarta, yaitu menciptakan masyarakat maju dalam berbudaya, modern, dan mengglobal dalam wawasan berfikir.

Inovasi sistem birokrasi yang berbasis pada kebudayaan mampu menjunjung tinggi kapabilitas, integritas, dedikasi, dan komitmen birokrasi sehingga terbangun kultur pelayanan publik yang optimal. Tumbuh dan berkembangnya komunitas-komunitas penggiat budaya memberikan nilai lebih pada ekspresi estetik dan non-estetik. Nilai-nilai tersebutlah yang mampu sebagai operasional dalam mewujudkan *civil society* pada Kesultanan yang modern.

Kehadiran sosok pemimpin baru yang muda, kreatif, dan inovatif sangat dibutuhkan di Yogyakarta untuk mencipta budaya. Potensi jasa kreatif, industri kreatif, dan budaya kreatif sangat besar di Yogyakarta. Investasi budaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kesultanan Yogyakarta memperkuat aksesibilitas infrastruktur sosial dan infrastruktur kebudayaan. Dengan demikian Kesultanan Yogyakarta yang modern siap menjawab tantangan globalisasi perkembangan zaman.

### **Pertumbuhan Ekonomi dan Wisata Budaya**

Dinamika pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta berbanding lurus dengan pertumbuhan wisata dan perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kreatif. Pertumbuhan hotel, *homestay*, restoran, cafe, dan pusat-pusat perbelanjaan modern dan tradisional juga menjadi magnet bagi wisatawan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, wisata, dan budaya di Yogyakarta, maka pertumbuhan penduduk juga tinggi.

Ekonomi kreatif di Yogyakarta sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa sektor ekonomi kreatif antara lain kuliner, *fashion*, kriya (kerajinan), dan film, animasi, seni rupa, serta seni pertunjukan. Perekonomian di Yogyakarta pasti dipengaruhi oleh perekonomian Indonesia, sedangkan perekonomian Indonesia sudah pasti dipengaruhi oleh perekonomian global. Dengan demikian Yogyakarta perlu bebenah dan mempersiapkan untuk menjawab perubahan ekonomi di tingkat global.

Pertumbuhan ekonomi kreatif di Yogyakarta merupakan bentuk kegiatan yang inklusif bagi kemajuan pariwisata. Tingkat kunjungan wisatawan pada momen liburan sekolah, libur lebaran, libur tahun baru, dan libur-libur nasional selalu melonjak. Artinya potensi ekonomi mikro sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Status sosial masyarakat tidak lagi ditentukan oleh faktor keturunan, akan tetapi yang mampu beradaptasi dengan globalisasi, maka akan meningkat secara ekonomi, dan sosial seiring dinamisasi yang terjadi.

Dinamisasi yang terjadi di Yogyakarta bukan hanya karena pertumbuhan dan perkembangan wisata saja. Keberadaan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Yogyakarta juga turut menyumbang masuknya pendatang (mahasiswa). Yogyakarta menjadi salah satu wilayah global di mana penduduknya berasal dari berbagai macam suku dari seluruh penjuru Indonesia, ras, agama, dan bahkan warga negara asing yang menempuh studi pada beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta.

Beberapa sudut kawasan di Kota Yogyakarta terus mengalami kemajuan mengingat kondisi yang strategis kegiatan ekonomi. Yogyakarta sebagai destinasi wisata budaya, wisata religi, dan pendidikan menjadi alasan terbesar bagi investor memilih bisnis bidang properti. Pembangunan hotel dan apartemen berdampak pada semakin meningkatnya kepadatan bangunan di wilayah Kota, demikian pula kondisi lalu lintas dan pertumbuhan kendaraan. Arus modernisasi dan globalisasi tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Hal ini bisa berdampak pada munculnya permasalahan sosial baru antara penduduk lokal dan pendatang.

*“Kami di sini, di provinsi, berprinsip investasi silakan investasi. Tapi kita bisa melihat kebutuhan,” ujarnya, sembari menekankan, Yogya mau-tak mau telah masuk ke medan kompetisi di era globalisasi. Wilayah itu akan tumbuh dengan sendirinya, karena pebisnis sudah tahu ada ruang ekonomi baru yang tumbuh. Mereka akan lihat potensi itu sendiri. Saya tidak mau terlambat. Kalau terlambat, akan jadi wilayah kumuh baru. (Wawancara Sri Sultan HBX dengan wartawan kumparan.com di Komplek Kepatihan 2 April 2018)*

Perkembangan dan kompetisi di era globalisasi ini pada akhirnya menuntut pembentukan kebudayaan baru yang tetap berpegang pada otoritas keraton. Dengan membentuk sebuah kekuatan bersifat modern namun tidak menentang feodalisme tradisional. Pada akhirnya pemerintah DIY dan Kesultanan Yogyakarta akan membentuk birokrasi yang rasional dan modern. Melihat hal tersebut Sri Sultan HBX tengah mempersiapkan sosok pemimpin yang lebih muda, gesit, agresif, dan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang luas sebagai penerusnya.

Beberapa dinamisasi pembangunan yang terbentuk di DIY dan Kesultanan Yogyakarta antara lain. Pertama; Pertumbuhan pembangunan hotel, apartemen, dan *homestay*. Kedua; Perkembangan sektor pariwisata diantaranya, wisata kuliner, wisata belanja, wisata religi, dan juga wisata sejarah. Ketiga; dinamisasi juga terjadi pada sistem birokrasi baik di lingkungan pemerintah provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, maupun di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Dinamisasi birokrasi antara pemerintah daerah dan otoritas kewenangan Kesultanan Yogyakarta mengadopsi sistem yang modern dan

mengikuti perkembangan era globalisasi.

Pada sisi dinamisasi gagasan pembangunan di Kesultanan Yogyakarta. Peneliti menilik melalui tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dari tahun ke tahun. Pertambahan jumlah kawasan hunian sebagai perkembangan dari Kesultanan Yogyakarta. Konsekuensi tersebut beriring dengan peningkatan pembangunan kawasan. Selain itu keberadaan perguruan tinggi negeri seperti UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan puluhan perguruan tinggi swasta, di Yogyakarta menjadi magnet masuknya ribuan pelajar dari luar daerah bahkan pelajar asing. Menyandang predikat sebagai Kota Pelajar, Kota Yogyakarta/Kesultanan Yogyakarta menjadi tujuan utama wisatawan.

Banyaknya Suku, Ras, dan Bangsa menjadi perbedaan untuk dikelola dengan beradab. Bukan hanya sekedar menang - kalah, semua masyarakat perlu saling menghargai harkat martabatnya. Modernitas selalu diuji berbagai masalah di masyarakat. Pembangunan hadir menjawab tantangan zaman, bukan mengubah masyarakat dari akar tradisinya. Percampuran budaya lokal dan luar melahirkan bentuk budaya baru di Kesultanan Yogyakarta dan saling menghegemoni.

Hegemoni merupakan bentuk upaya penguasaan terhadap kelompok tertentu oleh pemilik kekuasaan yang menggunakan kepemimpinan intelektual secara konsensus. Dominasi terjadi pada nilai-nilai kehidupan, norma, sosial, politik, bahkan kebudayaan yang ada di masyarakat dan akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat tertentu yang didominasi, sehingga secara sadar masyarakat tersebut mengikutinya (Surahman, 2017:174).

Dinamisasi pembangunan dan ekonomi kreatif menjadikan keseimbangan kehidupan yang berimbang pada kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta tumbuh berkembang, karena investor mengetahui ada ruang ekonomi yang tumbuh. Pertumbuhan ekonomi, wisata, dan budaya menjadikan dinamisasi tersendiri.

Kenyataan itu dirasakan dan pengetahuan diperoleh melalui moral, budaya, dan ideologis. Hegemoni tentunya menyiratkan terciptanya struktur pengetahuan dan sistem nilai tertentu. Kelompok sosial atau itu mampu membentuk sistem pengetahuan dan nilai tersendiri, dan mengubahnya menjadi konsepsi umum dan universal, adalah kelompok yang melatih kepemimpinan intelektual dan moral (Fontana, 1993:140).

## **KESIMPULAN**

Dominasi lelaki merupakan masa lalu bagi perempuan di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Di era globalisasi ini memberikan ruang kesetaraan gender di Kesultanan Yogyakarta. Takhta berhak dimiliki oleh orang yang telah ditempa dan siap bermahkotakan pengabdian. Seorang pemimpin harus satu nafas dengan rakyatnya bukan sekedar biologis. Keraton Yogyakarta sama seperti kota-kota lain yang harus siap menjawab tantangan zaman. Globalisasi kebudayaan memberikan warna baru pada sektor pariwisata di Yogyakarta.

Pergeseran globalisasi dan modernisasi di Kesultanan Yogyakarta mempengaruhi aturan, adat istiadat atau *paugeran* di dalamnya. Secara teoritis dan akademis terlihat bahwa ditengah-tengah budaya yang sangat lekat dengan tradisi-tradisi ternyata harus mampu berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sebagai langkah untuk tetap pada eksistensinya.

Rekomendasi akademis dari hasil penelitian ini bagi peneliti yang akan meleniti hal serupa, agar

bisa melihat dari sisi kepemimpinan perempuan di kesultanan Yogyakarta yang belum pernah ada sejak berdirinya Kerajaan Islam Mataram. Adapun rekomendasi metodologis dari hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan lebih menerapkan dengan paradigma kritis.

## REFERENSI

- Ahmed, Akbar S & Hastings Donnan. (1994). *Islam in the Aage of Postmodernity in Islam, Globalization and Postmodernity*. 29 West 35th Street, New York, NY. Routledge.
- Bakti, Andi Faisal. (2000). *Religious Values and Development: The Significance of the Indonesian Communication Experience.*” In Senyo Adjibolosoo (ed.). *eh Human Factor in Shaping the Course of History and Development*. New York. University Press of America.
- Bakti, Andi Faisal. (2013). *Relevansi Pemikiran Nurcholis Madjid untuk Pembangunan Bangsa*. Jurnal Titik Temu Jurnal Dialog Peradaban Vol 6 No. 1.
- Bakti, Andi Faisal. (2012). *Demokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Masyarakat Madani di Indonesia*. In *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta. Churia Press.
- Bakti, Andi Faisal. (2013). “*Multiculturalism in Indonesia: a Communication Prespective*”. In Jamal Edine et Yves Theoret (eds). *Reflection Sur Les Diversites Mondiales*. ORBICOM Casablanca Maroko. P. 125-130.
- Choiriyati, Wahyuni. (2017). *Suksesi Kepemimpinan Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur*. Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta Vol.15 No.1.
- Finlayson, Alan. (2010). *Democracy and Pluralism The political thought of William E. Connolly*. Simultaneously published in the USA and Canada. Routledge
- Fontana, B. (1993). *Hegemony and Power*. University of Minnesota Press Minneapolis London.
- Francese, J. (2009). *Perspectives on Gramsci (Politics, culture and social theory)*. Routledge Studies in Social and Politics Throught.
- James, Paul and Imre Szeman. (2000) *Globalization and Culture: Vol. 3 Global - Local Comsumption*. Los Angeles, London, Singapore, New Delhi, Washington DC. Sage Publiction
- James, Paul and Steger, Manfred B (2010) *Globalization and Culture: Vol. 4 Ideologies of Globalism*. Los Angeles, London, Singapore, New Delhi, Washington DC. Sage Publiction
- Jaya, Pajar Hatma Indra. (2012). *Dinamika Pola Pikir Orang Jawa di tengah Arus Modernisasi*. Jurnal Humaniora Vol. 24 No.2. UGM
- Lukens-Bull, Ronald. Amanda Pandich. and John P. Woods. (2008). *Islamization as Part of Globalization: Some Southeast Asian Examples*. Journal of International and Global Studies. P 32-46.
- Margana, S. (2010). *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Pustaka Pelajar dan The Toyota Foundation. Yogyakarta.
- Steger, Manfred B. (2008). *Globalization a Very Short Introduction*. Oxford University Press
- Surahman, Sigit. (2013). *Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni dan Budaya Indonesia..* Jurnal Lontar Vol. 2 Nomor 1. P 29-38
- Surahman, Sigit. (2016). *Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi Media Terhadap Seni Budaya Indonesia*. Jurnal Rekam Vol. 12 Nomor 1. April, 34

Surahman, Sigit, (2017). *Bingkai Media Pada Program Acara Televisi Satu Indonesia Net.Tv Episode Sultan HB X Dan Asia Calling Tempo Tv Episode Penerus Tahta Raja Yogyakarta*. Journal of Communication Nyimak. Vol. 1 No. 2. September, 174

Triyono, Agus; Dkk. (2017). *Resolusi Konflik Melalui Media Komunikasi*. Pustaka Media. Bandarlampung.

Vesajoki, Funlayo. (2002). *The Effects of Globalization on Culture "A Study of the Experiences of Globalization among Finnish Travellers"*. University of Jyväskylä Department of Ethnology. Jyväskylä.